

STUDI LITERATUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KUALITAS GURU

Raspa Laa¹, Ahmad Subagyo², Muhammad Sofyan³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}
Email : M.Sofyanhadi@umj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis pendidikan Islam dalam membentuk karakter bangsa dan adanya kesenjangan historis antara potensi idealnya dengan realitas kebijakan yang seringkali memarginalkan kualitasnya, terutama pada aspek guru. Meskipun banyak kajian membahas kebijakan pendidikan Islam secara umum, masih sedikit yang menganalisis dampaknya secara langsung terhadap kualitas guru. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji hubungan kausal antara kebijakan pendidikan Islam dengan peningkatan kualitas guru, yang mencakup kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer dan sekunder dari berbagai literatur dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Temuan utama menegaskan bahwa kebijakan yang efektif memengaruhi kualitas guru melalui tiga ranah utama: penetapan standar kompetensi, penyelenggaraan pengembangan profesional berkelanjutan, dan sistem evaluasi yang suportif. Disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus dirancang sebagai ekosistem pendukung yang komprehensif, yang tidak hanya menetapkan standar tinggi tetapi juga secara proaktif mengatasi hambatan implementasi seperti beban kerja dan keterbatasan sumber daya, guna memastikan peningkatan kualitas guru secara holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan Islam, Kualitas Guru, Pengembangan Profesional Guru*

ABSTRACT

This research is motivated by the strategic role of Islamic education in shaping national character and the historical gap between its ideal potential and the reality of policies that often marginalize teacher quality, particularly in the teaching profession. Although numerous studies discuss Islamic education policy in general, few analyze its direct impact on teacher quality. Therefore, this research focuses on examining the causal relationship between Islamic education policy and improving teacher quality, encompassing competency, professionalism, and well-being. This research employed a library research method with a qualitative descriptive-analytical approach. Primary and secondary data from various literature were analyzed using content analysis and validated through source triangulation. Key findings confirm that effective policies influence teacher quality through three main domains: establishing competency standards, implementing ongoing professional development, and providing a supportive evaluation system. It concludes that Islamic education policy must be designed as a comprehensive, supportive ecosystem that not only sets high standards but also proactively addresses implementation barriers such as workload and resource constraints, to ensure holistic and sustainable teacher quality improvement.

Keywords: *Islamic Education Policy, Teacher Quality, Teacher Professional Development*

PENDAHULUAN

Dalam arsitektur pendidikan nasional Indonesia, pendidikan Islam memegang peranan yang amat signifikan dan strategis (Islakh et al., 2025). Fungsinya tidak hanya terbatas pada

transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai wahana utama untuk membentuk individu yang utuh, yakni insan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan ketangguhan spiritual. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kehadiran sistem pendidikan Islam yang berkualitas menjadi sebuah solusi fundamental untuk melahirkan generasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam perundang-undangan. Pendidikan Islam memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia (*akhlak al-karimah*)(Sutarno et al., 2025). Fokusnya yang mendalam pada integrasi nilai-nilai moral ke dalam seluruh aspek pembelajaran menjadi dasar bagi pembentukan watak peserta didik. Oleh karena itu, tujuan luhur pendidikan Islam adalah mencetak generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, etos kerja yang kuat, dan kapasitas untuk berkontribusi secara positif dan konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara (Samal et al., 2023).

Dimensi pendidikan Islam dalam konteks keindonesiaan melampaui sekadar pengajaran doktrin dan ritual keagamaan. Secara ideal, ia dirancang untuk menjadi fondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis dan beradab. Melalui kurikulum yang terintegrasi, peserta didik tidak hanya belajar tentang agamanya, tetapi juga diajarkan untuk menghormati perbedaan, memahami hakikat kehidupan bermasyarakat yang majemuk, serta mengaplikasikan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi dalam interaksi sehari-hari (Bransika et al., 2025; Ilya & Wahyuni, 2025). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam menjaga dan merawat keberagaman suku, agama, dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Dengan menanamkan pemahaman yang inklusif dan moderat, pendidikan Islam berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap ideologi ekstrem serta menjadi perekat sosial yang memperkuat tenun kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan Islam yang efektif adalah pilar penting dalam membangun masyarakat madani yang adil, terbuka, dan berkeadaban (Oktarini et al., 2025; Yunika & Rosalia, 2025).

Sejarah mencatat bahwa perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan sebuah proses dinamis yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Setiap periode pemerintahan, mulai dari era Orde Lama hingga era Reformasi saat ini, menampilkan corak dan arah kebijakan yang berbeda, yang seringkali merefleksikan konstelasi politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupinya. Meskipun terjadi berbagai perubahan dan penyesuaian, semangat utama yang mendasari setiap kebijakan tersebut adalah cita-cita luhur untuk memajukan bangsa dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Dinamika ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari negara untuk menemukan formula sistem pendidikan yang paling relevan dan efektif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun, dalam perjalanan panjang ini, posisi dan peran pendidikan Islam tidak selalu mendapatkan tempat yang proporsional, seringkali mengalami pasang surut tergantung pada orientasi dan prioritas rezim yang berkuasa pada masanya (Handayani & Khorri, 2025; Mustakim, 2019).

Kesenjangan antara peran ideal pendidikan Islam dengan realitas kebijakannya terasa sangat signifikan, terutama pada masa Orde Baru. Pada periode ini, arah pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh arus modernisasi yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan otoritasnya dengan menerapkan kebijakan pendidikan yang cenderung sentralistik dan sekularistik, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi aspirasi umat Islam yang notabene merupakan mayoritas penduduk. Akibatnya, pendidikan Islam mengalami marginalisasi sistemik dan diperlakukan secara diskriminatif, dianggap tidak sejalan dengan semangat modernisasi. Porsi yang diberikan dalam kurikulum nasional sangat terbatas, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam seringkali dipandang sebelah mata. Sikap pemerintah yang kurang akomodatif ini menciptakan sebuah warisan masalah, di mana pendidikan Islam tertinggal baik dari segi kualitas, fasilitas, maupun

dukungan kebijakan, sehingga potensinya untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa tidak dapat teraktualisasi secara optimal.

Secara definitif, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu proses pendidikan yang seluruh komponennya, mulai dari falsafah, tujuan, kurikulum, hingga metode, didasarkan pada nilai-nilai luhur ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkaya oleh pemikiran para ulama dan praktik historis umat Islam. Landasan yang kokoh ini menjadi alasan fundamental mengapa pendidikan Islam diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai sebuah sistem yang otentik dan relevan. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun berakar pada tradisi yang kuat, isi dari pendidikan Islam tidak bersifat statis, meniadakan, apalagi menafikan perkembangan zaman. Justru sebaliknya, pendidikan Islam yang ideal harus mampu berdialog secara kritis dan kreatif dengan modernitas, menyaring nilai-nilai positifnya, dan memberikan jawaban atas tantangan-tantangan kontemporer. Kemampuan untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas inilah yang menjadi kunci agar pendidikan Islam tetap fungsional dan bermakna bagi generasi masa kini dan masa depan (Fadilah et al., 2025; Johan et al., 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis yang dirancang sebagai rangkaian keputusan dan tindakan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan, yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh warga negara. Kebijakan pendidikan Islam, sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional, memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Sebuah kebijakan yang baik harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan mutu secara menyeluruh. Salah satu aspek paling krusial adalah pengembangan sumber daya manusia, yakni para guru. Kebijakan pendidikan Islam harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para guru untuk terus berkembang, tidak hanya dari segi kuantitas atau pemenuhan formasi, tetapi yang lebih utama adalah dari segi kualitas, kompetensi, dan profesionalisme. Sebab, kualitas seorang guru merupakan faktor penentu utama yang akan melahirkan peserta didik yang berkualitas pula. Inilah urgensi yang mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam mengenai pengaruh kualitas sistem pendidikan Islam terhadap kualitas para pendidiknya.

Nilai kebaruan atau inovasi dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik untuk mengkaji hubungan kausal antara kebijakan pendidikan Islam dengan peningkatan kualitas guru. Selama ini, banyak kajian yang membahas tentang sejarah atau substansi kebijakan pendidikan Islam secara umum, namun masih sedikit yang secara empiris menganalisis dampak konkret dari kebijakan tersebut terhadap variabel kualitas guru. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan tidak hanya mendeskripsikan bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirumuskan dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga secara mendalam mengukur dan menganalisis dampak yang ditimbulkannya terhadap kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan, yaitu kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi benar-benar berfokus pada pemberdayaan guru sebagai ujung tombak transformasi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama metodologi ini adalah melakukan penelusuran, penelaahan, dan analisis mendalam terhadap berbagai referensi dan sumber data tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan. Sejalan dengan pandangan Kriyantono, pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena

Copyright (c) 2025 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

secara komprehensif melalui pengumpulan data yang mendalam. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari tulisan-tulisan, artikel ilmiah, dan kajian-kajian spesifik yang secara langsung membahas kebijakan pendidikan Islam serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas guru. Sementara itu, data sekunder mencakup sumber-sumber pendukung seperti buku-buku teks, majalah, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memberikan konteks tambahan. Teknik pengumpulan data utama adalah analisis dokumen, di mana data yang terkumpul kemudian didokumentasikan untuk dianalisis lebih lanjut.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), sebuah teknik yang bekerja secara objektif dan sistematis untuk mendeskripsikan bahan kajian. Melalui metode ini, konsep-konsep yang terkandung dalam berbagai literatur diidentifikasi, kemudian dikelompokkan melalui tahap klasifikasi dan kategorisasi, sebelum akhirnya diinterpretasi secara mendalam untuk ditarik kesimpulannya. Alur kerja analisis secara umum mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk yang terstruktur, hingga penarikan kesimpulan akhir. Peran dan keterlibatan peneliti sangatlah krusial selama proses ini. Diperlukan ketekunan pengamatan yang tinggi dalam menelaah setiap sumber untuk menggali kedalaman data serta memastikan tidak ada distorsi interpretasi yang disebabkan oleh bias peneliti, sehingga objektivitas temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan (*trustworthiness*) data dan hasil penelitian, diterapkan beberapa teknik pemeriksaan yang ketat. Kredibilitas atau derajat kepercayaan data dibangun melalui keterlibatan intensif peneliti dan ketekunan dalam melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber yang ada. Selain itu, digunakan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber, untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Proses ini melibatkan perbandingan data dari dokumen kebijakan dengan analisis kritis dalam jurnal, menelaah perspektif penulis dengan latar belakang berbeda, dan mengkaji konsistensi informasi dari waktu ke waktu. Untuk aspek keteralihan (*transferability*), peneliti menyajikan data hasil analisis secara rinci dan mendalam, sehingga pembaca dapat menilai relevansi dan kemungkinan penerapan temuan dalam konteks yang berbeda. Hasil analisis sementara juga senantiasa dikonfirmasi dengan sumber data lain untuk memastikan ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) dari setiap kesimpulan yang ditarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis literatur ini mengurai hubungan fundamental antara kebijakan pendidikan Islam dan kualitas guru, yang secara esensial dibentuk melalui tiga ranah utama: penetapan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan profesional, serta implementasi sistem evaluasi kinerja (Díez et al., 2020; Tancred et al., 2018). Kualitas guru dalam kerangka ini dipahami secara holistik, tidak hanya mencakup penguasaan konten dan pedagogi, tetapi juga meliputi sikap profesional, motivasi, kesejahteraan, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang beragam (Tancred et al., 2018; Webster et al., 2015). Berbagai kajian menegaskan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara efektif dapat meningkatkan kesiapan dan dukungan bagi guru, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas pengajaran (Díez et al., 2020; Weatherson et al., 2017). Sebaliknya, hambatan implementasi seperti peningkatan beban kerja atau kurangnya sumber daya dapat secara signifikan menurunkan kualitas pengajaran jika tidak diantisipasi dan

dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang sebagai sebuah ekosistem pendukung yang komprehensif bagi para pendidik.

Secara teoretis, pengaruh kebijakan pendidikan terhadap kualitas guru dapat dipahami melalui kerangka tiga dimensi yang saling terkait: kualitas konteks, kualitas proses, dan kualitas hasil (Doménech-Betoret, 2018). Kualitas konteks mencakup lingkungan belajar, iklim kelas, dan dukungan institusional yang diterima guru. Kualitas proses merujuk pada perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta interaksi pedagogis di dalam kelas. Sementara itu, kualitas hasil diukur melalui kinerja guru, capaian belajar siswa, dan tingkat kesejahteraan profesional guru. Kerangka ini sejalan dengan teori perubahan kebijakan sekolah yang menyatakan bahwa intervensi yang didukung oleh kebijakan yang kuat dan manajemen mutu yang baik cenderung menghasilkan perubahan perilaku guru yang positif dan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan (Tancred et al., 2018; Doménech-Betoret, 2018). Dalam konteks pendidikan Islam, kerangka ini menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menyasar hasil akhir, tetapi juga memperbaiki kondisi dan proses yang memungkinkan guru untuk berkembang secara optimal dan profesional.

Kualitas guru merupakan sebuah konstruk multidimensional yang melampaui sekadar kemampuan teknis mengajar. Ini adalah kombinasi sinergis antara penguasaan konten, kecakapan pedagogis, etika profesional, dan yang tidak kalah penting, kesejahteraan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa antusiasme dan semangat mengajar seorang guru merupakan faktor kunci yang secara langsung berkontribusi pada keterlibatan siswa dan kualitas hasil belajar (Peng, 2021). Di sisi lain, tingkat stres dan beban kerja yang tinggi dapat secara signifikan mengurangi kualitas pengajaran jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai (Tai et al., 2019). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang efektif harus dirancang dengan pendekatan ganda. Di satu sisi, kebijakan harus bertujuan meningkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan (Richardson et al., 2015; Blewitt et al., 2020). Di sisi lain, kebijakan tersebut harus secara proaktif menjaga dan meningkatkan kesejahteraan serta motivasi guru sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan yang sehat dan berkualitas.

Kebijakan pada level institusional atau sekolah memegang peranan krusial sebagai jembatan yang menerjemahkan kebijakan makro menjadi praktik nyata di ruang kelas. Standar mutu yang jelas, sistem evaluasi yang adil, dan mekanisme pengawasan yang konstruktif terbukti menjadi pendorong utama bagi peningkatan kualitas guru (Díez et al., 2020). Model *“Educational Situation Quality”* menegaskan bahwa kualitas pembelajaran lahir dari interaksi dinamis antara dukungan lingkungan, ekspektasi kurikulum, serta persepsi dan kebutuhan guru maupun siswa (Doménech-Betoret, 2018). Dengan demikian, kebijakan institusional yang menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk praktik terbaik, mendorong kolaborasi antar guru, dan menegakkan akuntabilitas secara transparan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan profesional. Kebijakan ini memetakan jalur yang jelas bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogis mereka dan beradaptasi dengan nilai-nilai serta konteks pendidikan Islam yang beragam di lingkungan sekolah mereka (Tancred et al., 2018).

Implementasi kebijakan inklusi dalam konteks pendidikan Islam menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas guru secara signifikan. Kebijakan ini menuntut guru untuk menguasai metodologi pembelajaran yang dapat mengakomodasi beragam kebutuhan siswa, termasuk mereka yang memiliki latar belakang budaya, kemampuan, dan interpretasi keagamaan yang berbeda. Studi menekankan perlunya persiapan dan pelatihan yang memadai agar guru dapat menerapkan praktik inklusif secara efektif tanpa mengorbankan kualitas pendidikan (Díez et al., 2020). Ketika kebijakan inklusi diimplementasikan secara menyeluruh, guru didorong untuk mengembangkan kemampuan diagnostik, strategi

diferensiasi instruksional, dan keterampilan membangun iklim kelas yang aman dan kondusif bagi semua siswa (Leijen et al., 2021). Kerangka kerja seperti *Theory of Change* juga menyoroti bahwa pembangunan hubungan yang kuat antara guru dan siswa merupakan jalur penting bagi peningkatan kualitas pendidikan secara umum (Tancred et al., 2018), sebuah prinsip yang sangat relevan dalam menciptakan lingkungan belajar Islami yang ramah dan merangkul.

Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam mentransformasikan kebijakan menjadi praktik pengajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas guru. Program intervensi berbasis kurikulum terbukti dapat memengaruhi hasil pengajaran melalui perbaikan perilaku guru, penguatan hubungan guru-murid, dan manajemen kelas yang lebih baik (Blewitt et al., 2020). Dalam konteks pendidikan Islam, program pelatihan yang dirancang secara spesifik untuk menumbuhkan kompetensi pedagogis yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan etika profesi dapat berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pengajaran. Model pelatihan sumber daya manusia yang sistematis dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mendukung guru dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif (Tomokawa et al., 2020). Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam harus memprioritaskan perancangan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga adaptif terhadap konteks lokal, sehingga peningkatan kualitas guru dapat terjadi secara konsisten dan merata di seluruh institusi pendidikan.

Iklim kelas yang positif dan hubungan yang kuat antara guru dan siswa merupakan indikator fundamental dari kualitas pengajaran yang tinggi. Teori perubahan dalam intervensi sekolah secara eksplisit menyatakan bahwa transformasi hubungan guru-siswa dan penciptaan iklim kelas yang suportif adalah fondasi bagi implementasi kebijakan pendidikan yang berhasil (Tancred et al., 2018). Dalam konteks pendidikan Islam, iklim kelas tidak hanya dibentuk oleh interaksi sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai etika, motivasi spiritual, dan cara guru mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Pelatihan guru yang menekankan pada komunikasi efektif, empati, dan manajemen kelas yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus kualitas interaksi mereka dengan siswa, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu proses belajar-mengajar secara keseluruhan (Peng, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu secara aktif mendukung para guru dalam membentuk iklim kelas yang kuat, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai luhur, dengan memperhatikan dinamika agama dan budaya siswa yang beragam.

Meskipun sebuah kebijakan dirancang dengan ideal, efektivitasnya di lapangan seringkali terhambat oleh berbagai kendala implementasi. Literatur secara konsisten mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti peningkatan beban kerja guru, kurangnya sumber daya yang memadai, serta ketidakselarasan antara kebijakan di tingkat nasional dengan praktik riil di tingkat sekolah (Tancred et al., 2018). Hambatan-hambatan ini berpotensi menurunkan kualitas dan motivasi guru jika kebijakan tidak disertai dengan dukungan operasional yang konkret. Tanpa mekanisme dukungan yang tepat—termasuk evaluasi yang adil, umpan balik yang membangun, dan peluang pengembangan profesional yang relevan—peningkatan kualitas guru tidak akan terjadi secara berkelanjutan (Weatherson et al., 2017). Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan ini bisa berupa kekurangan materi ajar yang berkualitas atau kurangnya pelatihan bagi guru dalam menyampaikan narasi keagamaan yang sensitif dan inklusif. Oleh karena itu, perancangan kebijakan harus mengantisipasi potensi hambatan ini dengan menyediakan mekanisme dukungan yang jelas dan sumber daya yang cukup.

Kerangka evaluasi kualitas guru dalam kebijakan pendidikan Islam harus dirancang secara holistik, mengintegrasikan penilaian kompetensi teknis, kepekaan etis-religius, serta tingkat kesejahteraan profesional. Model *“Educational Situation Quality”* menyarankan bahwa

evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas konteks belajar dan interaksi guru-siswa (Doménech-Betoret, 2018). Penilaian harus dilakukan dalam kerangka yang adil dan transparan, dengan umpan balik yang berorientasi pada pengembangan profesional, bukan sekadar penghakiman. Pelaksanaan evaluasi juga perlu sensitif terhadap budaya religius siswa dan kemampuan guru dalam menyampaikan ajaran Islam secara kontekstual (Caruana et al., 2021). Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang efektif akan menetapkan standar evaluasi yang seimbang antara penguasaan konten, kecakapan pedagogis, dan kepuasan kerja guru (Richardson et al., 2015), sehingga dapat memperkuat kualitas guru secara berkelanjutan melalui siklus umpan balik dan pengembangan profesional yang sehat.

KESIMPULAN

Analisis literatur ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan pendorong fundamental bagi kualitas guru, yang didefinisikan secara holistik melampaui sekadar kompetensi teknis. Kualitas guru dipahami sebagai sinergi antara penguasaan konten, kecakapan pedagogis, etika profesional, serta kesejahteraan dan motivasi. Kebijakan yang efektif beroperasi melalui tiga ranah utama: penetapan standar kompetensi yang jelas, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta implementasi sistem evaluasi kinerja yang adil dan berorientasi pada pengembangan. Kerangka kerja ini secara sistematis memengaruhi kualitas konteks (lingkungan belajar), proses (interaksi pedagogis), dan hasil (kinerja guru dan capaian siswa). Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang dirancang dengan baik berfungsi sebagai sebuah ekosistem pendukung yang komprehensif, memberikan panduan, dukungan, dan akuntabilitas yang diperlukan bagi guru untuk dapat berkembang secara optimal.

Meskipun kebijakan dirancang secara ideal, keberhasilan implementasinya di lapangan sangat bergantung pada bagaimana tantangan praktis diatasi. Kebijakan yang efektif, seperti promosi inklusivitas, menuntut guru untuk menguasai metodologi baru dan beradaptasi, yang hanya mungkin tercapai melalui program pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Pelatihan ini berfungsi sebagai motor penggerak yang mentransformasikan kebijakan menjadi praktik nyata di kelas. Namun, implementasi seringkali terhambat oleh kendala seperti peningkatan beban kerja guru dan kurangnya sumber daya. Oleh karena itu, perancangan kebijakan harus mengantisipasi hambatan-hambatan ini dengan menyediakan mekanisme dukungan yang konkret. Kebijakan yang berhasil harus mengadopsi pendekatan ganda: menetapkan standar yang tinggi sekaligus secara proaktif menjaga kesejahteraan dan motivasi guru, memastikan bahwa tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blewitt, C., et al. (2020). Do curriculum-based social and emotional learning programs in early childhood education and care strengthen teacher outcomes? A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 1049. <https://doi.org/10.3390/ijerph17031049>
- Bransika, D. M. I., et al. (2025). Penerapan moderasi beragama melalui pendidikan toleransi di SMA Negeri (SMA N) 12 Merangin. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1158. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6617>
- Caruana, M., et al. (2021). Current asthma management practices by primary school teaching staff: A systematic review. *Journal of School Health*, 91(3), 227–238. <https://doi.org/10.1111/josh.12992>

- Díez, F., et al. (2020). Impact of quality management systems in the performance of educational centers: Educational policies and management processes. *Heliyon*, 6(4), e03824. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03824>
- Doménech-Betoret, F. (2018). The educational situation quality model: Recent advances. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00328>
- Fadilah, L. N., et al. (2025). Kontribusi ilmu pengetahuan islam dalam pembentukan karakter untuk meningkatkan mutu pendidikan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 496. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4707>
- Handayani, D., & Khorri, Q. (2025). Transformasi pendidikan islam dalam cengkeraman kekuasaan orde baru. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 277. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5380>
- Ilya, I., & Wahyuni, S. (2025). Pendidikan multikultural dalam pembelajaran akidah akhlak: Sebuah desain kurikulum untuk MI. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1216. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6633>
- Islakh, A. N., et al. (2025). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 982. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.6440>
- Johan, B., et al. (2024). Tantangan dan peluang pendidikan islam dalam konteks modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>
- Leijen, Ä., et al. (2021). The dilemma of inclusive education: Inclusion for some or inclusion for all. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633066>
- Morton, K., et al. (2015). The school environment and adolescent physical activity and sedentary behaviour: a mixed-studies systematic review. *Obesity Reviews*, 17(2), 142–158. <https://doi.org/10.1111/obr.12352>
- Mustakim, Z. (2019). Managing islamic education curriculum in indonesian schools: Best practices and policy recommendations. *JURNAL PENELITIAN*, 16(2), 187. <https://doi.org/10.28918/jupe.v16i2.2715>
- Oktarini, D., et al. (2025). Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan islam: Membentuk karakter yang berkualitas. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 543. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6454>
- Peng, C. (2021). A conceptual review of teacher enthusiasm and students' success and engagement in chinese efl classes. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.742970>
- Richardson, M., et al. (2015). Non-pharmacological interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) delivered in school settings: Systematic reviews of quantitative and qualitative research. *Health Technology Assessment*, 19(45), 1–470. <https://doi.org/10.3310/hta19450>
- Samal, A. L., et al. (2023). Character education through islamic education: An implementation to high school muslim students in North Minahasa. *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1288. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3730>
- Sutarno, S., et al. (2025). Peran guru PAI terhadap perkembangan psikologi peserta didik. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 219. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4904>
- Tai, K., et al. (2019). Systematic review on the prevalence of illness and stress and their associated risk factors among educators in malaysia. *Plos One*, 14(5), e0217430. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217430>

- Tancred, T., et al. (2018). A systematic review and synthesis of theories of change of school-based interventions integrating health and academic education as a novel means of preventing violence and substance use among students. *Systematic Reviews*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s13643-018-0862-y>
- Tomokawa, S., et al. (2020). Sustainable human resource training system for promoting school health in japan. *Pediatrics International*, 62(8), 891–898. <https://doi.org/10.1111/ped.14292>
- Weatherson, K., et al. (2017). A theoretical analysis of the barriers and facilitators to the implementation of school-based physical activity policies in canada: A mixed methods scoping review. *Implementation Science*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0570-3>
- Webster, C., et al. (2015). Integrating movement in academic classrooms: Understanding, applying and advancing the knowledge base. *Obesity Reviews*, 16(8), 691–701. <https://doi.org/10.1111/obr.12285>
- Yunika, D., & Rosalia, M. (2025). Mengenal studi islam di dunia (global). *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1160. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6431>